

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada September 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 2,69 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,72. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 12,54 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,28 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,64 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,58 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,57 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,01 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,71 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok transportasi sebesar 0,29 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,45 persen; dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,54 persen. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Provinsi Nusa Tenggara Barat bulan September 2025 sebesar 0,22 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) di bulan September 2025 sebesar 1,57 persen.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada September 2025 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan di 3 kabupaten/kota IHK di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada September 2025 terjadi inflasi y-on-y sebesar 2,69 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,87 pada September 2024 menjadi 108,72 pada September 2025. Tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,22 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 1,57 persen.

Berdasarkan press release BPS pada tanggal 1 Oktober 2025, inflasi nasional untuk inflasi bulan ke bulan (*September 2025 terhadap Agustus 2025*) berada pada angka 0,21%. Sedangkan untuk inflasi Nasional tahun ke tahun (*September 2025 terhadap September 2024*) berada pada angka 2,65%. Untuk inflasi bulan ke bulan (*September 2025 terhadap Agustus 2025*) Provinsi NTB berada pada angka 0,22%. Sedangkan untuk inflasi Provinsi NTB tahun ke tahun (*Agustus 2025 terhadap Agustus 2024*) Provinsi NTB berada pada angka 2,69%. Inflasi bulan ke bulan untuk Kota Mataram sebesar 0,39%. Sedangkan Inflasi tahun ke tahun sebesar 3,01%. Untuk Kabupaten Lombok Barat angka inflasi mengacu pada Kota Mataram.

Andil beberapa komoditas terhadap inflasi/deflasi September 2025 (m-to-m) pada Kota Mataram (Kabupaten Lombok Barat mengacu pada Kota Mataram) untuk inflasi : Daging ayam ras, emas perhiasan, pisang, daging sapi, sigaret kretek mesin (SKM). Sedangkan untuk komoditas penyumbang deflasi September 2025 diantaranya bawang merah, tomat, cabai rawit, angkutan udara, dan sabun mandi cair.

DAFTAR HARGA KEBUTUHAN POKOK STRATEGIS BERDASARKAN DATA SP2KP BULAN JULI, AGUSTUS, DAN SEPTEMBER 2025 PADA KAB. LOMBOK BARAT

NO	JENIS BARANG	SATUAN	BULAN			KETERANGAN
			JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	

1	Beras Cap IR (Medium)	Kg	13.500	13.500	13.500	Stabil
2	Beras Cap Mataram (Premium)	Kg	14.500	14.575	15.000	Stabil
3	Beras Cap Padiku (Premium)	Kg	14.500	14.575	15.000	Stabil
4	Beras SPHP Bulog	Kg	12.000	12.000	12.000	Stabil
5	Kedelai Lokal,1 kg	Kg	15.000	15.000	15.000	Stabil
6	Kedelai Impor,1 kg	Kg	14.000	14.000	14.000	Stabil
7	Cabai Merah Keriting,1 kg	Kg	43.449	30.700	33.905	Tidak Stabil
8	Cabai Merah Besar,1 kg	Kg	27.217	27.950	28.333	Stabil
9	Cabai Rawit Merah,1 kg	Kg	46.043	27.200	22.667	Tidak Stabil
10	Cabai Rawit Hijau,1 kg	Kg	19.043	17.400	14.714	Tidak Stabil
11	Bawang Merah,1 kg	Kg	41.522	45.500	33.238	Tidak Stabil
12	Gula Pasir Curah, 1kg	Kg	17.000	17.000	17.000	Stabil
13	Gula Pasir Kemasan, 1kg	Kg	18.000	18.000	18.000	Stabil
14	Minyak Goreng Curah,1 lt	Kg	18.522	19.000	19.000	Stabil
15	Minyak Goreng Kemasan Premium,1 lt	Kg	19.000	19.450	20.000	Stabil
16	Minyakita,1 lt	Kg	15.700	15.700	15.700	Stabil

17	Tepung Terigu,1 kg	Kg	13.000	13.000	13.000	Stabil
18	Daging Ayam Ras Karkas,1 kg	Kg	32.348	35.550	41.048	Tidak Stabil
19	Telur Ayam Ras,1 kg	Kg	29.500	29.500	29.500	Stabil
20	Daging Sapi Paha Belakang,1 kg	Kg	125.000	125.000	127.143	Stabil
21	Daging Sapi Tetelan,1 kg	Kg	60.000	60.000	60.000	Stabil
22	Ikan Bandeng,1 kg	Kg	42.087	41.500	40.000	Stabil
23	Ikan Tongkol,1 kg	Kg	27.652	26.500	25.000	Stabil
24	Ikan Teri,1 kg	Kg	80.000	80.000	80.000	Stabil
25	Bawang Putih Honan,1 kg	Kg	30.348	33.000	35.000	Stabil
26	Bawang Putih Kating,1 kg	Kg	39.000	39.000	39.000	Stabil
27	Garam Halus,1 kg	Kg	10.000	10.000	10.000	Stabil
28	Susu Kental Manis, 370 gr	Kg	12.000	12.000	12.000	Stabil
29	Susu Bubuk (Setara Dancow),400 gr	Kg	42.000	42.000	42.000	Stabil
30	Udang Basah,1 kg	Kg	64.304	60.500	60.000	Stabil
31	Tomat,1 kg	Kg	19.609	6.750	3.714	Tidak Stabil
32	Kentang Sedang,1 kg	Kg	18.000	18.000	18.000	Stabil
33	Sawi Hijau,1 kg	Kg	8.000	8.000	8.000	Stabil

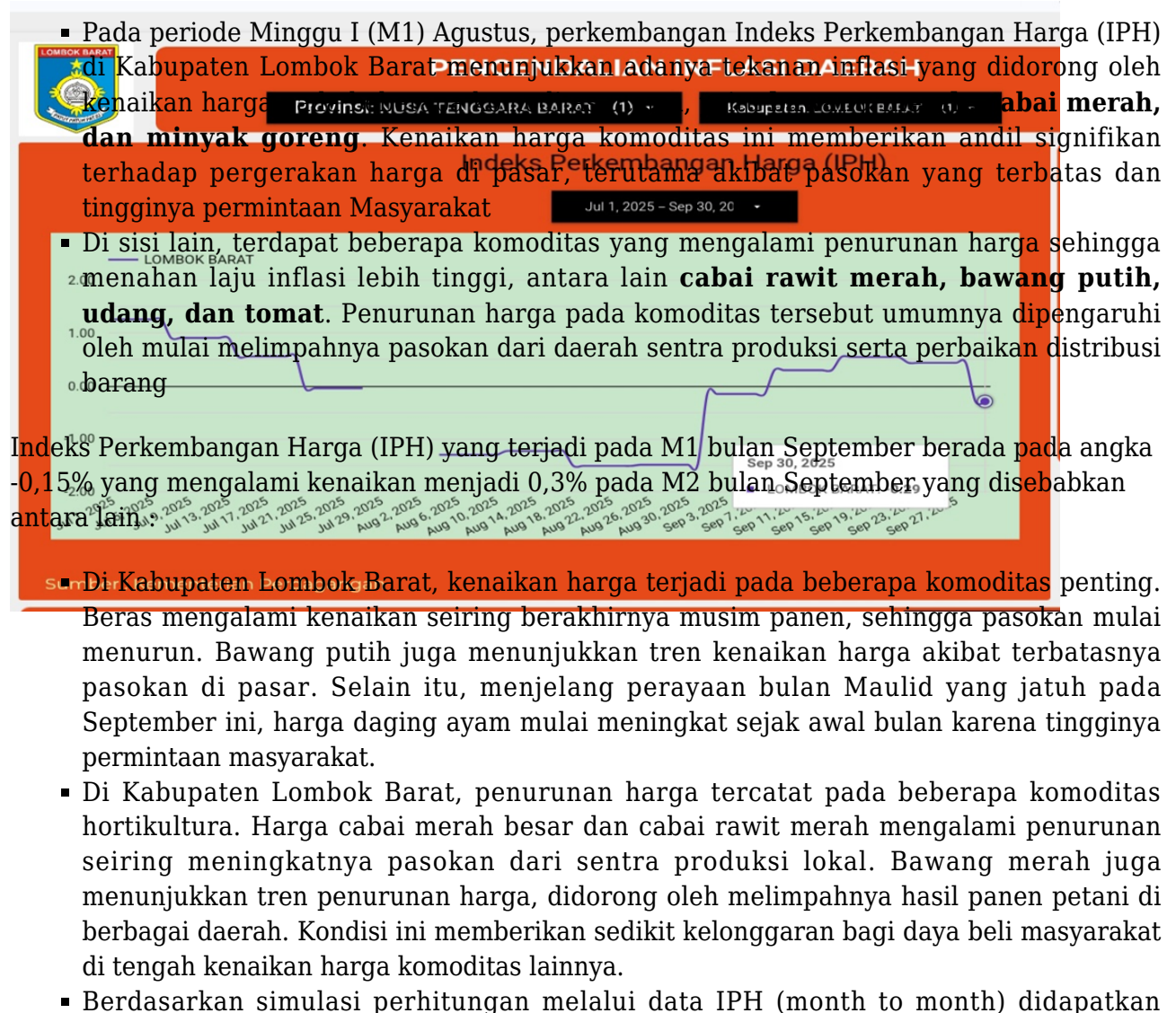
34	Kangkung,1 kg	Kg	6.000	6.000	6.000	Stabil
35	Ketimun Sedang,1 kg	Kg	6.261	6.000	6.000	Stabil
36	Kacang Panjang,1 kg	Kg	8.000	8.000	8.000	Stabil
37	Ayam Kampung Utuh,1 ekor	Kg	65.000	65.000	65.000	Stabil
38	Telur Ayam Kampung,1 kg	Kg	54.000	54.000	54.000	Stabil

Sumber Data Disperindag Kab. Lombok Barat

GRAFIK INDEKS PERKEMBANGAN HARGA (IPH) KAB. LOMBOK BARAT TANGGAL

1 JULI S/D 30 SEPTEMBER 2025

Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang terjadi pada M4 Juli berada pada angka -0,04% mengalami penurunan menjadi -1,3% pada M1 Agustus yang disebabkan antara lain:



simulasi hasil YoY IPH Kabupaten Lombok Barat pada Bulan Agustus sedikit diatas target nasional (>5%). Hal ini menunjukkan perlu pengendalian Inflasi yang intensif. Apabila IPH pada akhir September (M-4 September) berada pada rentang deflasi -0,50 s/d deflasi -2,25 (deflasi tipis) IPH YoY Lombok Barat dalam rentang aman (on the track) mengikuti target Nasional.

Berdasarkan hasil pantauan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Triwulan III tahun 2025 (Juli-September), perkembangan harga barang kebutuhan pokok di Pasar Gerung menunjukkan dinamika yang bervariasi, dipengaruhi oleh faktor musiman, distribusi barang, serta tingkat permintaan masyarakat. Secara umum, harga beberapa komoditas mengalami fluktuasi harga, namun secara keseluruhan tetap dalam kondisi terkendali. Selama periode ini terjadi kenaikan harga pada beberapa komoditi seperti daging ayam ras, daging sapi dan tomat yang dipengaruhi oleh musim tanam, dan bertepatan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, sehingga berdampak pada harga barang kebutuhan pokok. Sementara itu, harga bawang merah naik karena berkurangnya pasokan dari sentra produksi utama di luar daerah. Dari sisi lain komoditas beras, gula pasir, dan minyak goreng kemasan, ikan segar dan sayur-mayur relatif stabil selama triwulan ini. Stabilitas ini tercapai berkat adanya pengawasan distribusi serta dukungan pasokan dari kabupaten tetangga dan musim panen di petani lokal, harga telur ayam ras dan tepung terigu juga menunjukkan tren yang cenderung stabil, dengan fluktuasi harga dalam batas yang wajar. Adapun beberapa komoditas seperti cabe rawit, cabe merah besar dan cabe keriting mengalami penurunan harga pada triwulan ini, seiring dengan meningkatnya hasil panen lokal dan melimpahnya pasokan dari petani lokal. Secara umum, kondisi harga barang kebutuhan pokok di Pasar Gerung dan Pasar Kediri pada Triwulan III masih tergolong terjaga dan stabil, meskipun terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga akibat faktor perayaan, musiman tanam, dan distribusi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan stakeholder terkait guna menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang di pasar. Adapun beberapa komoditas seperti cabe rawit, cabe merah besar dan cabe keriting mengalami penurunan harga pada triwulan ini, seiring dengan meningkatnya hasil panen lokal dan melimpahnya pasokan dari petani lokal. Secara umum, kondisi harga barang kebutuhan pokok di Pasar Gerung dan Pasar Kediri pada Triwulan III masih tergolong terjaga dan stabil, meskipun terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga akibat faktor perayaan, musiman tanam, dan distribusi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan stakeholder terkait guna menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang di pasar.

Komoditi Beras pada triwulan III ini harganya cukup signifikan, dengan rata rata harga RP 14.000,- (Empat Belas Ribu Rupiah) sampai Rp 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah). Di Kabupaten Lombok Barat setiap hari ada panen padi namun kondisi saat ini belum mampu menurunkan harga beras. Hal ini disebabkan oleh Harga GKP (Gabah Kering Panen) dari petani ke pengepul/pelaku usaha beras masih cukup tinggi dimana dari bulan April - Juni 2025 rata - rata GKP masih diangka Rp 7.300,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah)/kg diatas HPP yang ditetapkan Pemerintah. Tingginya harga cabe.di sebabkan oleh gagalnya program bantuan Cabe ke masyarakat yang berkisar antara 95% disebabkan oleh Intensitas curah hujan yang tinggi serta hanyutnya Laporan TPID Triwulan III Dinas Pertanian Kab. Lombok Barat tanaman cabai dilahan sawah yang disebabkan oleh banjir. Walaupun harga cabe di pasar Tradisional Kabupaten Lombok Barat terbilang Tinggi Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) sampai Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) selama 3 bulan terakhir namun stock cabai di pasaran cukup tersedia. Tingginya harga cabai tidak terlalu berpengaruh pada

masyarakat karena Pemerintah Kabupaten Lombok Barat khususnya Pasar Tani/Tenten Tani Pertanian gencar melakukan pasar murah (OPM) ke desa-desa yang tidak menjadi sentra cabai dengan harga dibawah harga pasar/harga jual petani.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pada bulan September ini terjadi kendala penyaluran gas LPG 3 kg di wilayah kecamatan Kuripan hal ini menyebabkan banyak warga Kecamatan kuripan melakukan pembelian langsung di SPPBE PT. Lombok Menara Energygas, dengan terjadinya kegiatan tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat langsung bertindak secara cepat mengatasi masalah tersebut dengan mengadakan rapat lintas sektoral yang di Pimpin oleh Asisten II dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan dihadiri oleh pihak pertamina, Dinas ESDM, Biro Ekonomi Provinsi, Polresta Mataram, Polres Lombok Barat, Komisi II DPRD Lombok Barat, Bagian Ekonomi dan SPPBE yang berada diwilayah Lombok Barat.
2. Ketergantungan terhadap Musim (Musiman)
 - Produksi pangan sangat bergantung pada musim tanam yang belum sepenuhnya dikelola dengan sistem irigasi modern.
 - Ketika musim kemarau, produksi menurun, memicu kenaikan harga.
3. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengendalian harga pada Dinas Pertanian terkait komoditas tersebut diatas antara lain :aBahwa pada musim panen padi saat ini (Juli-September) rata-rata GKP Petani dijual dengan harga 7.200,00 s/d 7.600,00/kg- diatas HPP, hal ini mempengaruhi tingginya harga beras berada di harga Rp 14.000 s/d Rp 15.000,- dipasar tradisional
 - a. Rendahnya harga cabai karena produksi dari hasil program bantuan cabai kemasyarakat yang di tanam pada bulan Mei dan Juni 2025 termasuk tinggi dan supply dari luar daerah terus berdatangan tidak sebanding dengan permintaan luar Daerah.
 - b. Fluktuasi harga hanya terjadi di Cabai merah besar dan Keriting di minggu terakhir bulan September. Hal ini terjadi karena kurangnya produksi dan perminaan dari pulau Jawa terus meningkat.
 - c. Dukungan anggaran APBD untuk kegiatan pengembangan komoditi Bawang berkurang terkait budidaya, pasca panen serta dukungan SDM kepada pelaku utama dan pelaku usaha.
 - d. Kurangnya intensitas koordinasi dan komunikasi dengan stake holder terkait seperti pengepul, pengusaha dan aparat penegak hukum, ketika harga komoditi melambung tinggi, tindakan pemantauan dan pengawasan dilapangan ditingkatkan.
 - e. Saat Harga rendah Pemerintah Daerah sudah ada kepedulian kepada petani dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Tentang Tenten Tani Keliling dimana salah satu pasalnya berbunyi petani bisa menjual produksinya langsung ke konsumen akhir dengan harga diatas harga pasar/sama dengan harga pasar ke ASN Pemerintah Kabupaten

Lombok Barat.

4. Permasalahan utama pengendalian inflasi Daerah diantaranya:
 - a. Rendahnya konektivitas jaringan distribusi pangan, permasalahan daerah yang memiliki tingkat ketergantungan pasokan antar daerah yang cukup tinggi.
 - b. Kesenjangan informasi dan distorsi struktur pasar, kesenjangan informasi antar pelaku ditengah panjangnya rantai distribusi menyebabkan tidak efisiennya harga dipasar
 - c. Produktivitas pangan yang berkurang / tidak optimal karena adanya kendala iklim yang tidak menentu khususnya di Kabupaten Lombok Barat.
 - d. Ketersediaan beberapa bahan pangan didaerah berkurang karena terjadinya pola tanam yang berubah sehingga memerlukan pasokan ketersediaanya berasal dari antar daerah
5. Kenaikan harga komoditas perikanan disebabkan karena berkurangnya ketersediaan ikan di pasar terutama jenis-jenis ikan hasil tangkapan seperti ikan tongkol dan ikan kembung. Berkurangnya ketersediaan disebabkan berkurangnya hasil tangkapan karena faktor musim dan kondisi cuaca. sedangkan untuk perikanan hasil budidaya relatif stabil hal ini disebabkan terjaminnya ketersediaan ikan dan stabilnya harga dan pasokan pakan ikan. Kenaikan harga udang segar/udang basah disebabkan karena kenaikan harga di pihak distributor atau udang berasal dari wilayah luar Lombok (tambahan biaya transport).

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

UPAYA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH DI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2025

1.KETERJANGKAUAN HARGA

MELAKUKAN OPERASI PASAR/GERAKAN PANGAN MURAH/PASAR TANI

- Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melaksanakan Operasi Pasar Murah (OPM)/Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Pasar Tani bersinergi dengan Bank Indonesia (BI), Bulog dan OPD terkait secara berkala.
- Untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pakan sebagai penyebab utama kenaikan harga ikan khususnya ikan budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat tetap melakukan pemantauan yang dilakukan oleh penyuluh perikanan di masing-masing wilayah. Selain itu untuk ketersediaan komoditas ikan pemantauan dilakukan di Cold Storage yang ada di Dusun Ireng Desa Jati Sela Kecamatan Gunung Sari dan sentra pemindangan di Kecamatan Batulayar.
- Untuk kegiatan survey harga pasar dilakukan setiap hari oleh Disperindag, Dikpangan dan Diperta Kab. Lobar pada pada Pasar Kediri dan Pasar Gerung. Melaporkan pergerakan harga komoditas rutin melalui aplikasi Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) untuk memonitor Perkembangan Harga secara harian. Data atas laporan indeks perkembangan harga (IPH) yang digunakan sebagai laporan Ke Kemendagri adalah data yang diperoleh dari Disperindag Kab.Lobar yang kemudian akan di laporkan ke Itjen Kemendagri oleh Inspektorat. Data terkait indeks perkembangan harga (IPH) Kabupaten Lombok Barat dapat diakses melalui <http://s.bps.go.id/iphlobar>. Dan untuk update harga Kabupaten Lombok Barat dapat diakses melalui <http://s.bps.go.id/updatepasarlobar>. Selain itu dapat juga diakses melalui

JADWAL PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH (OPM), GERAKAN PANGAN MURAH (GPM) DAN TEN TEN TANI BULAN JULI S/D SEPTEMBER 2025

NO	LOKASI	KECAMATAN	TANGGAL KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Taman Kota Gerung	Gerung	5 Juli 2025	TENTAKEL
2.	Taman Kota Gerung	Gerung	6 Juli 2025	TENTAKEL
3.	Lapangan Desa Bajur	Labuapi	10 Juli 2025	OPM
4.	Taman Kota Gerung	Gerung	13 Juli 2025	TENTAKEL
5.	Taman Kota Gerung	Gerung	20 Juli 2025	TENTAKEL
6.	Taman Kota Gerung	Gerung	27 Juli 2025	TENTAKEL
7.	Taman Kota Gerung	Gerung	3 Agustus 2025	TENTAKEL
8.	Taman Kota Gerung	Gerung	10 Agustus 2025	TENTAKEL
9.	Halaman Kantor Dinas Pertanian	Labuapi	15 Agustus 2025	TENTAKEL
10.	Taman Kota Gerung	Gerung	24 Agustus 2025	TENTAKEL
11.	Halaman Kantor Lurah Dasan Geres	Gerung	28 Agustus 2025	OPM DAN GPM
12.	Halaman Kantor Camat Narmada	Narmada	30 Agustus 2025	GPM/TENTAKEL
13.	Taman Kota Gerung	Gerung	31 Agustus 2025	TENTAKEL
14.	Baital Atiq Gerung	Gerung	4 September 2025	TENTAKEL
15.	Taman Kota Gerung	Gerung	7 September 2025	TENTAKEL
16.	Desa Gelogor	Kediri	10 September 2025	OPM DAN GPM
17.	Desa Dasan Tereng	Narmada	11 September 2025	OPM
18.	Taman Kota Gerung	Gerung	12 September 2025	TENTAKEL
19.	Taman Kota Gerung	Gerung	14 September 2025	TENTAKEL
20.	Halaman Kantor Desa Lembar Selatan	Gerung	16 September 2025	TENTAKEL

21.	Halaman Kantor Desa Lembar Selatan	Gerung	17 September 2025	TENTAKEL
22.	Halaman Kantor Camat Batulayar	Batulayar	20 September 2025	TENTAKEL
23.	Taman Kota Gerung	Gerung	21 September 2025	TENTAKEL
24.	Halaman BPP Kantor Camat Sekotong	Sekotong	24 September 2025	TENTAKEL
25.	Taman Kota Gerung	Gerung	28 September 2025	TENTAKEL

2.KETERSEDIAAN PASOKAN

MELAKSANAKAN SIDAK PASAR DAN SIDAK GUDANG DISTRIBUTOR

- Sebagai respon cepat atas laporan masyarakat terkait kelangkaan gas LPG 3 kg di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lombok Barat melakukan kegiatan inspeksi mendadak (sidak) di tiga SPPBE yaitu SPPBE PT. Om Agus, SPPBE PT. Menara Energygas dan SPPBE PT. Harapan Jaya Mandiri tim dari Disperindag juga melakukan sidak ke beberapa agen dan pangkalan LPG 3 kg yang tersebar di berbagai kecamatan.
- Sidak ini dilaksanakan untuk mengecek langsung kondisi stok dan distribusi gas LPG 3 kg serta mengidentifikasi penyebab terjadinya kelangkaan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Tim Disperindag turun ke lapangan bekerja sama dengan pihak Pertamina serta aparat desa setempat.

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN SIDAK PASAR DAN SIDAK GUDANG DISTRIBUTOR BULAN JUNI S/D SEPTEMBER 2025

NO	TANGGAL SIDAK	LOKASI SIDAK	KECAMATAN	KETERANGAN
1	26 Agustus 2025	SPPBE PT. Om Agus	Lembar	Sidak/Pengawasan Penyaluran dan Ketersediaan Gas Lpg 3 kg
2	27 Agustus 2025	Gudang Alfamart Puskud Gudang Jembatan Baru Mart	Dasan Cermen Kediri	Sidak/Pengawasan Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya
3	16 September 2025	Pangkalan Kuripan, SPPBE Lombok Menara Energygas	Kuripan	Sidak/Pengawasan Ketersediaan Gas Lpg 3 Kg
4	22 September 2025	Pangkalan LPG Wilayah Lombok Barat		Cek ketersediaan Gas LPG di pangklaan

OPERASI PASAR PENYALURAN BERAS SPHP

Bulog melaksanakan kerjasama dengan pedagang selaku mitra bulog untuk menyalurkan beras SPHP di 4 Pasar kecamatan dan Pasar Gerung menjadi salah satu acuan untuk melaksanakan Operasi Pasar khusus untuk penyaluran beras SPHP dengan melibatkan Pimpinan beserta Kepala OPD yang tergabung dalam Tim TPID Tingkat Kab. Lobar. Pendrop-an Beras SPHP dilaksanakan 2 kali dalam satu minggu yaitu setiap hari senin dan kamis dengan jumlah 1,5 - 2 ton per satu kali droping untuk tiap mitra bulog.

HARGA GABAH

Menurunnya Produktivitas padi di Lombok Barat di bulan Juli - September 2025 karena musim kemarau basah atau Musim Tanam II. Produktivitas padi rata-rata 5,5 ton/hektar menyebabkan harga Gabah Kering panen mengalami peningkatan di harga 7.300-7.600/ kg di pinggir jalan. Namun dengan kondisi saat ini sock beras di Kabupaten Lombok Barat masih aman sampai 3 (tiga) bulan kedepan.

3.KELANCARAN DISTRIBUSI

1. Pengaturan dan pengawasan kendaraan angkutan barang

Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari, mulai dari Juli s/d September 2025, adapun personil yang dilibatkan diganti setiap bulannya. Setiap bulannya, jumlah personil yang dilibatkan sebanyak 9 orang dengan lokus kegiatan pada Tempat Parkir Khusus Segenter. Penertiban ini bertujuan untuk memberikan ruang parkir bagi kendaraan barang yang notabene adalah kendaraan besar agar tidak melakukan parkir di bahu jalan. Adapun kendaraan yang parkir sebagian besar adalah kendaraan yang akan menuju Pelabuhan Lembar maupun pelabuhan Gili Mas dengan tarif yang sangat terjangkau. Ketersediaan ruang parkir ini cukup penting dalam rangka memperlancar arus lalu lintas terlebih pada ruas jalan utama menuju Pelabuhan. Dengan lancarnya arus lalu lintas, maka arus distribusi barang, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder menjadi lancar juga, tiba tepat waktu dan mengurangi biaya distribusi. Setiap harinya, personil mencatat/mendata kendaraan yang melakukan parkir di Segenter. Adapun jumlah kendaraan angkutan barang yang parkir pada Tempat Parkir Khusus Segenter dari bulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2025 adalah sebanyak 2.604 unit.

2. Pengujian Laik Jalan Kendaraan

Adapun aktifitas yang dilaksanakan antara lain:

- Pelaksanaan uji berkala pada kendaraan angkutan orang dan barang
- Pemberian rekomendasi laik jalan bagi kendaraan yang memenuhi syarat keamanan dan keselamatan
- Pengawasan angkutan orang dan barang yang tidak laik jalan

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan setiap hari Senin s/d Sabtu di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. Dampak yang ditimbulkan terhadap pengendalian inflasi adalah Memastikan kendaraan angkutan orang dan barang yang beroperasi sudah laik jalan, sehingga resiko kecelakaan lalu lintas yang menghamat distribusi barang dapat dikurangi.

3.Pengawasan lalu lintas dan penertiban areal terminal

Lokasi Pelaksanaan penertiban terminal adalah pada sejumlah terminal di wilayah Kabupaten Lombok Barat, diantaranya :

- Shelter Narmada
- Shelter Gunungsari
- Shelter Keru
- Shelter Kediri

Adapun aktifitas yang dilaksanakan adalah :

-Penertiban areal terminal untuk kelancaran arus keluar masuk kendaraan angkutan penumpang dan barang menuju terminal dan pasar

-Pengawasan kelancaran lalu lintas pada seluruh terminal, terlebih pada hari pasaran maupun menjelang Hari Raya

4. KOMUNIKASI EFEKTIF

- Penyelenggaraan High Level Meeting dan Rapat Koordinasi TPID Provinsi NTB untuk membahas tantangan dan strategi tindak lanjut pengendalian inflasi serta koordinasi ketersediaan bahan pokok terutama menjelang.
- Melakukan rapat koordinasi dan strategi lintas sektoral dalam upaya mengendalikan tekanan inflasi pada sejumlah komoditas pangan strategis.
- Mengikuti kegiatan Capacity Building dan Workshop TPID

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Keterbatasan Anggaran bersumber APBD dalam pelaksanaan pengendalian Inflasi, terutama terhadap program subsidi transportasi untuk mendukung kegiatan distribusi dalam pelaksanaan operasi pasar/Gerakan pangan/Pasar tani.
 - Masih terdapat kendala dalam pemeliharaan jaringan terhadap pengembangan Web Silakniki (sistem pelaporan harga terkini) untuk memberikan informasi terkait harga dan kegiatan dalam pengendalian inflasi serta melakukan bimtek kepada tenaga operator web silakniki.
 - Pentingnya penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan menjaga kelancaran distribusi komoditas pangan.
 - Kebutuhan akan inovasi dalam mendukung ketersediaan pangan sepanjang tahun dan kelancaran distribusi serta indikasi surplus devisa pangan di masing-masing daerah.
 - Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi daerah untuk tahun anggaran 2025 berupa pemberian subsidi transportasi pada saat pelaksanaan kegiatan operasi pasar murah.
 - Terkait penyaluran BLT DD pada Triwulan III bulan juli sampai September 2025 sudah tersalur. Untuk itu pihak Dinas PMD tetap melakukan pemantauan dan tetap berupaya agar BLT DD dapat tersalur tepat waktu. Sedangkan untuk program ketahanan pangan sampai dengan bulan September pemerintah desa banyak melakukan eksekusi, hal ini disebabkan karena untuk program ketahanan pangan ada kaitannya dengan proses perencanaan dan rembuk kelompok masyarakat.
 - Dari hasil evaluasi pelaksanaan pengendalian inflasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, ditemukan berbagai permasalahan sebagai berikut :
1. Belum adanya personil PPNS yang memadai untuk melakukan penindakan/penertiban

dalam kegiatan pengawasan kendaraan laik jalan

2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat pemilik kendaraan angkutan / orang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan
3. Belum adanya fasilitas yang memadai di Tempat Parkir Khusus Segenter bagi pengemudi yang melakukan parkir kendaraan
4. Masih kurangnya fasilitas yang memadai pada lokasi terminal yang bersinggungan dengan pasar
5. Masih kurangnya ketersediaan angkutan umum pedesaan yang melayani trayek menuju pusat perekonomian

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Agar inflasi dapat terjaga berada pada kisaran angka sesuai target Nasional, sehingga dapat menjamin dan memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan terus melakukan pengecekan harga harian di pasar tradisional dan terus melaporkan hasil harga pasar kepada Pemerintah Pusat melalui SP2KP.
- Agar Tim TPID semakin solid melakukan upaya pengendalian inflasi di daerah dengan terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti melakukan kegiatan operasi pasar, sidak pasar, Gerakan menanam, serta penggunaan dana BTT dalam pengendalian inflasi di daerah
- Agar pemanfaatan aplikasi digital seperti QRIS dan sejenisnya semakin dikembangkan sehingga dapat membantu Pemasaran produk UMKM melalui Aplikasi dan QR Code E-LAPAK SITEBEL dan QR Code E-LAPAK SITEBEL diharapkan dapat merambah hingga ke Hotel-Hotel yang berada di Lombok Barat.
- Dukungan dan perhatian Pemerintah Pusat terhadap pengendalian inflasi daerah semakin meningkat melalui pengalokasian dana, sarana dan prasarana dalam pengendalian Inflasi.
- Untuk menjaga kestabilan harga di sektor kelautan dan perikanan upaya yang dilakukan antara lain : Bantuan Bibit dan Pakan, Bantuan peralatan penangkapan, Fasilitasi pembangunan Pembuatan pakan mandiri, dan monitoring unit pengolahan ikan. Penerapan teknologi atau alat penyimpanan (cold storage) yang dapat memperpanjang masa penyimpanan produk perikanan sehingga gejolak harga dapat dikendalikan.
- Intervensi pemerintah juga dibutuhkan dalam hal penyediaan anggaran untuk mendukung langkah-langkah pengendalian inflasi seperti operasi pasar murah. Subsidi harga pada saat terjadi kenaikan harga ikan.
- Mengupayakan agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa dapat tersalurkan tepat waktu agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
- Mengupayakan agar Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMDes) serta program Tanaman Pangan Lestari berjalan sesuai dengan rencana berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan memanfaatkan Dana Desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah desa di 119 desa se kabupaten Lombok Barat sesuai dengan road map.
- Memfasilitasi Masyarakat Desa agar memanfaatkan pekarangan rumah melalui program Pengembangan Desa Wisata Sayur dapat segera terealisasi dengan memanfaatkan dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah desa yang berkoordinasi dengan dinas instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan.
- Tidak meratanya harga sembilan kebutuhan (Sembako) ditengah-tengah masyarakat desa, karena dipengaruhi oleh faktor letak geografis desa masing-masing. Berdasarkan latar belakang tersebut Maka DPMD Kabupaten Lombok Barat selaku OPD yang langsung dan secara intens berhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan

dengan Desa Se Kab. Lobar, kembali melakukan langkah-langkah yang strategis dengan semua OPD dan Instansi Vertikal yang melakukan pelayanan melalui : “ Pemda Menyapa Desa tahun 2025 “

- Rekomendasi kebijakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat:
 - a. Meningkatkan efisiensi produksi pertanian dengan memperbaiki infrastruktur pertanian, meningkatkan akses ke teknologi pertanian yang modern, dan memberikan pelatihan yang berkualitas kepada
 - b. Meningkatkan produktivitas pertanian dengan menggalakkan penggunaan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan, serta mengoptimalkan pengelolaan air dan lahan pertanian.
 - c. Mendorong diversifikasi usaha pertanian dengan memberikan pelatihan kepada petani untuk mengembangkan komoditas pertanian yang beragam, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada satu komoditas saja.
 - d. Memperkuat pasar pertanian dengan meningkatkan akses petani ke pasar yang lebih luas, memperbaiki infrastruktur pasaran, serta mengimplementasikan regulasi yang memungkinkan terciptanya pasar yang sehat dan berdaya saing.
 - e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas stok pangan dengan mengoptimalkan regulasi impor dan ekspor, serta mendorong keberlangsungan kegiatan riset dan pengembangan pertanian.
 - f. Penting adanya subsidi harga produk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat disaat harga melonjak tinggi disamping adanya subsidi Fasilitas Transportasi Pangan (FDP) saat pelaksanaan kegiatan pasar Tani/ Tenten Tani Keliling (TENTAKEL) .
 - g. Mendukung pembentukan koperasi pertanian, untuk membantu petani dalam memperoleh harga yang adil dan mengurangi biaya produksi.
- Rekomendasi kebijakan pada DPMD Kab. Lombok Barat

Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menekan laju inflasi terutama di desa antara lain :

1. Mengupayakan agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa dapat tersalurkan tepat waktu agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
 2. Mengupayakan agar Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMDes) serta program Tanaman Pangan Lestari berjalan sesuai dengan rencana berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan memanfaatkan Dana Desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah desa di 119 desa se kabupaten Lombok Barat.
 3. Mengupayakan agar program Pengembangan Desa Wisata Sayur dapat segera terrealisasi dengan memanfaatkan dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah desa yang berkoordinasi dengan dinas instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan.
 4. Tidak meratanya harga sembilan kebutuhan (Sembako) ditengah-tengah masyarakat desa, karena dipengaruhi oleh faktor letak geografis desa masing-masing. Berdasarkan latar belakang tersebut Maka DPMD Kabupaten Lombok Barat selaku OPD yang langsung dan secara intens berhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan dengan Desa Se Kab. Lobar, kembali melakukan langkah-langkah yang strategis dengan semua OPD dan Instansi Vertikal yang melakukan pelayanan melalui : “ Pemda Menyapa Desa tahun 2025 “
- Rekomendasi kebijakan pada Dinas perhubungan Kab. Lombok Barat :

a. Perbaikan Fasilitas Pendukung di setiap tempat parkir, terminal dan Pelabuhan Pengumpan

Ketersediaan terminal maupun pelabuhan cukup penting dalam kelancaran transportasi. Untuk itu fasilitas pendukung terus ditingkatkan pada terminal di Kabupaten Lombok Barat, khususnya tempat parkir khusus angkutan barang. Pendistribusian komoditas yang efisien akan menurunkan harga jual dan dapat menekan angka inflasi. Selain didukung dengan fasilitas pendukung, hal yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan yang lebih intensif oleh personil Dinas Perhubungan yang dilakukan di sejumlah terminal, baik pengawasan dalam penertiban parkir kendaraan maupun kegiatan bongkar muat.

b. Evaluasi jumlah jaringan trayek menuju pusat perekonomian.

Hingga saat ini, jumlah jaringan trayek di Kabupaten Lombok Barat adalah 31 jaringan. Dalam hal jaringan trayek yang menghubungkan pusat perekonomian, dari keseluruhan jaringan tersebut, hanya 75% jaringan yang tergolong aktif, 25% diantaranya masih non aktif. Artinya belum ada angkutan/moda transportasi yang beroperasi dalam trayek tersebut. Kebijakan ke depannya adalah mengaktifkan kembali koperasi angkutan khususnya pada jaringan non aktif, sehingga jumlah angkutan pedesaan mencukupi kebutuhan masyarakat dari dan menuju pusat perekonomian. Hal ini mendukung pemerintah secara tidak langsung dalam mengoptimalkan distribusi komoditas pangan utama kepada masyarakat sehingga dapat menekan angka inflasi.

c. Penyediaan prasarana dan perlengkapan jalan di sepanjang jalur strategis menuju pusat perekonomian. Kondisi jalan yang mantap dan perlengkapan jalan yang berkeselamatan memberikan dampak tidak langsung berupa kenyamanan bagi pengguna jalan khususnya pengemudi angkutan kendaraan barang maupun pelaku ekonomi lainnya yang berkegiatan di pasar. Mengurangi dampak kecelakaan lalu lintas sehingga distribusi berbagai komoditi utama pangan juga lancar.